

# **Dukungan India terhadap Junta Militer Myanmar (2004-2009): Kerjasama Ekonomi dan Rivalitas dengan Cina**

**Ravi Mirza Fitri – 070912024**

*Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga*

## **ABSTRACT**

*This research questioned the support given by the Government of India to the Burmese military junta during the leadership of Manmohan Singh (2004-2009). The support and constructive relationship carried out by India to Burma is based on 3 factors: first, India's increasingly needs for energy in which Burma have plenty of it, secondly, the Indian government is trying to remove the rampant poverty in Northeast Region of India by establishing border trade with Burma to speed up economic growth in the Northeastern India, and the third, is because India regards Chinese presence in Burma as a threat due to continued strong Chinese influence in Burma which may affect the security of India. The discussion is divided into; internal factors, which include the Indian energy needs and the poverty elimination in Northeastern India, and external factors, namely the Indian effort to provide a contest against Chinese presence and influence over Myanmar. The research then concludes with the affirmation that India's support is based on 3 main factors which already been describe previously, including several suggestions for further research.*

**Keywords:** *India, Support, Burma, Threat, China, Manmohan Singh.*

*Penelitian ini mengangkat dukungan yang diberikan pemerintah India kepada pemerintah junta militer Myanmar selama masa kepemimpinan Manmohan Singh yang pertama (2004-2009). Dukungan dan hubungan konstruktif yang berusaha dijalin oleh India kepada Myanmar didasari oleh 3 faktor yaitu kebutuhan energi India yang terus meningkat setiap tahun karena percepatan pertumbuhan ekonomi dimana energi ini terdapat banyak di Myanmar, kemudian upaya penghapusan kemiskinan di wilayah India Timur Laut yang berusaha dihapus oleh pemerintah India dengan membuka border trade dengan Myanmar, serta kehadiran Cina di Myanmar yang dianggap India sebagai ancaman karena pengaruh Cina yang terus menguat di Myanmar dapat mempengaruhi keamanan India. Pembahasan dibagi dalam faktor internal yang termasuk pemenuhan kebutuhan energi India dan penghapusan kemiskinan di India Timur Laut serta faktor eksternal yaitu usaha India untuk mengkontes pengaruh dan keberadaan Cina di Myanmar. Penelitian ditutup dengan afirmasi argumentasi bahwa dukungan India memang didasari oleh 3 faktor utama kepentingan India di Myanmar dengan menyertakan saran untuk penelitian lebih lanjut.*

**Kata-Kata Kunci:** *India, Dukungan, Myanmar, Ancaman, Cina, Manmohan Singh.*

## Anomali Dukungan India kepada Demokrasi di Myanmar

India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia<sup>1</sup>, namun disisi lain, India memilih untuk terus melanjutkan kebijakan luar negeri yang mendukung pemerintahan junta militer Myanmar yang non-demokratis dan cenderung represif. Perbedaan sikap India terhadap pemerintahan junta militer Myanmar dimulai sejak dekade 90-an dimana India memilih untuk tidak turut campur pada urusan dalam negeri maupun kepemimpinan junta militer Myanmar yang ditandai dengan kunjungan Jyotindra Nath Dixit, Menteri Luar Negeri India 1991-1994, ke Yangon pada 1993<sup>2</sup>. Pada tahun 1997, India menolak permintaan dari gerakan dan aktivis pro-demokrasi dari Myanmar untuk membuka kantor perwakilan di New Delhi<sup>3</sup>.

Kemudian, sebagai bagian dari pengejaran hubungan persahabatan dengan Myanmar, pemerintah India memilih untuk menjauh dari segala aktivitas kecaman internasional terhadap pemerintahan junta militer Myanmar yang dipimpin oleh Amerika Serikat terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan penindasan anggota National League for Democracy (NLD) di Myanmar. India bersama dengan Cina, lebih memilih untuk diam ketika seluruh dunia mengutuk tindakan pemerintah Myanmar yang memblokir Aung San Suu Kyi di luar Yangon dan kemudian menempatkan dia sebagai tahanan rumah. India juga merupakan salah satu dari sedikit negara yang memilih untuk menentang keputusan International Labour Organization (ILO) untuk segera mengambil tindakan terhadap pemerintah junta militer Myanmar yang tidak berhasil menghapuskan sistem kerja paksa di Myanmar<sup>4</sup>. Meskipun pemerintah India memperbolehkan ratusan aktivis pro-demokrasi Myanmar untuk tinggal di India, namun pemerintah India selalu mengawasi dan mencermati secara ketat dan seksama segala aktivitas pergerakan dan kegiatan mereka disana. Dalam beberapa kasus<sup>5</sup>, pemerintah India bahkan memberikan batasan terhadap program-program politik mereka.

---

<sup>1</sup> Freedom House, "Freedom in the World 2011", [internet] <http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2011> diakses pada 15 Oktober 2012

<sup>2</sup> N. Chandra Mohan, "Realism in India-Myanmar Relations" [internet] [http://www.financialexpress.com/old/fe\\_full\\_story.php?content\\_id=42065](http://www.financialexpress.com/old/fe_full_story.php?content_id=42065) diakses pada 15 Oktober 2012

<sup>3</sup> Lakshmana A Chetty, "India-Myanmar Partnership: Need for Widening and Deepening" dalam *India and ASEAN Foreign Policy Dimensions for the 21<sup>st</sup> Century*, (New Delhi: New Century Publications, 2005), 175-177.

<sup>4</sup> Thin Thin Aung & Soe Myint, "India-Burma Relations", dalam *Challenges to Democratization in Burma: Perspective in Multilateral and Bilateral Responses*, ed. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, (Stockholm: International IDEA, 2001), 97.

<sup>5</sup> Thin Thin Aung & Soe Myint, "India-Burma Relations", 97.

Tiga hari sebelum kunjungan Jenderal Maung Aye<sup>6</sup> ke India pada bulan November 2010, India menolak kedatangan salah seorang aktivis pro-demokrasi terkemuka Myanmar yang dalam pengasingan dari bandara meskipun aktivis tersebut memegang visa yang sah yang dikeluarkan oleh konsulat India di Chiang Mai, Thailand<sup>7</sup>. Dari sini terlihat bahwa pemerintah India mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan insiden memalukan bagi para pemimpin tinggi Myanmar selama melakukan kunjungan di India yang nantinya dapat memperburuk hubungan dengan junta militer Myanmar. Kemudian, pernyataan dari pemerintah India yang menunjukkan keengganan untuk ikut campur maupun memberi dukungan baik material maupun moril terhadap perjuangan demokrasi di Myanmar ditunjukkan oleh Menteri Luar Negeri India, Saleem I. Shervani, saat melakukan kunjungan di bulan November 1997 ke Myanmar. Shervani mendapat pertanyaan mengenai bagaimana dukungan India terhadap gerakan pro-demokrasi Myanmar, dan dia menjawab bahwa India adalah negara demokrasi yang tidak hanya mengajarkan kebebasan namun juga mempraktekannya, tetapi India tidak akan pernah membiarkan dirinya (India) dimanfaatkan oleh siapapun untuk mendestabilisasi negara lain<sup>8</sup>.

Sikap yang diambil oleh India merupakan sebuah keanehan terhadap dukungan kepada demokrasi karena pada dasarnya India sendiri merupakan negara yang menjalankan sistem pemerintahan demokratis yang dibuktikan dengan adanya praktek-praktek kebebasan berekspresi, pemilihan umum yang bebas, keberadaan perwakilan rakyat, kesetaraan berpolitik, dan lain sebagainya. Perbedaan sikap India juga semakin terlihat kontras apabila ditinjau dari pandangan masyarakat internasional yang tendensinya lebih menolak terhadap perilaku kepemimpinan junta militer Myanmar. Contohnya seperti tindakan yang diambil oleh negara-negara Eropa dan European Union (EU) dimana sejak akhir 1980an beberapa negara Eropa secara individual telah menghentikan segala bantuan non-kemanusiaan untuk Myanmar. Pada tahun 1990 European Community (EC) memberlakukan embargo persenjataan yang kemudian diikuti dengan pemberhentian sementara kerjasama pertahanan pada tahun 1991.

Pada tahun 1996, EU bersama dengan Kanada meminta kepada para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membahas bersama proses demokratisasi di Myanmar yang pada saat tersebut pula, EU telah menjatuhkan sanksi tambahan untuk Myanmar seperti larangan visa

---

<sup>6</sup> Jenderal Maung Aye adalah wakil ketua dari *State Peace and Development Council* (SPDC). SPDC adalah lembaga pemerintahan junta militer tertinggi di Myanmar.

<sup>7</sup> Thin Thin Aung & Soe Myint, "India-Burma Relations", 97.

<sup>8</sup> Thin Thin Aung & Soe Myint, "India-Burma Relations", 98.

pada anggota junta militer Myanmar, seluruh anggota pemerintahan Myanmar, dan anggota militer senior serta keluarganya. EU juga menghentikan segala jenis kunjungan pemerintahan untuk Myanmar. Lebih lanjut pada 1997, menanggapi pengaduan yang diberikan oleh International Confederation Free Trade Union (ICFTU) dan European Trade Union Confederation (ETUC), Komisi Eropa segera mengadakan penyelidikan yang ditujukan untuk mempertegas kebenaran mengenai adanya praktek kerja paksa di Myanmar, dan sebagai akibat dari temuan kerja paksa yang masih berlaku, EU kembali menjatuhkan sanksi untuk Myanmar dengan menghilangkan hak spesial perdagangan preferensial untuk Myanmar dengan EU. Lalu pada bulan April tahun 2000 EU semakin memperkuat sanksi pada Myanmar demi mendukung tuntutan *National League for Democracy* (NLD)<sup>9</sup> dan beberapa NGO dengan mengeluarkan Regulasi Dewan Eropa nomor 1081/2000 tertanggal 22 Mei 2000 yang berisi larangan penyediaan peralatan yang mungkin digunakan untuk kegiatan penindasan ataupun terorisme oleh junta militer Myanmar serta pembekuan dana yang disimpan di luar negeri oleh orang-orang yang terdaftar dalam larangan visa yang disebut sebelumnya<sup>10</sup>.

Amerika Serikat (AS) juga memiliki visi yang sama dengan EU mengenai permasalahan Myanmar yang ditunjukkan dengan keluarnya *Executive Order* (EO) 13047 pada tanggal 20 Mei 1997 oleh presiden Bill Clinton yang menetapkan bahwa pemerintah Myanmar telah menerapkan represi dengan skala besar terhadap pihak oposisi demokratis di Myanmar dan menyatakan kondisi negara Myanmar dalam keadaan darurat nasional sehubungan dengan tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Myanmar tersebut. Kemudian, AS juga mengeluarkan *International Emergency Economic Powers Act* (IEEPA) nomor 50 U.S.C. 1701-1706 yang berisi larangan segala bentuk investasi baru di Myanmar oleh penduduk AS dan penduduk asing yang difasilitasi oleh penduduk AS. Pada 28 Juli 2003, presiden George Bush juga mengundang-undangkan *Burmese Freedom and Democracy Act of 2003* (BFDA) yang berfungsi untuk membatasi sumber-sumber keuangan junta militer Myanmar dan melarang AS untuk mengimpor segala produk dari Myanmar dan ekspor serta re-ekspor segala jenis jasa keuangan dari AS maupun penduduknya dimanapun berada kepada Myanmar. Pada tanggal 30 April 2008, presiden George Bush kembali mengeluarkan EO bernomor 13464 untuk mengambil langkah-langkah tambahan yang digunakan untuk mem-blok semua akses terhadap

---

<sup>9</sup> Partai pimpinan Aung San Suu Kyi yang berasas demokrasi.

<sup>10</sup> Anaïs Tamen, "The European Union Sanctions Related to Human Rights: The Case of Burma/Myanmar" [internet] [http://www.ibiblio.org/obl/docs/Memoire-AT.htm#\\_Toc54419311](http://www.ibiblio.org/obl/docs/Memoire-AT.htm#_Toc54419311) diakses pada 3 November 2013.

properti bagi para pemimpin Myanmar<sup>11</sup> sehubungan dengan keadaan darurat nasional yang dijelaskan dalam EO 13047.

Terdapat beberapa asumsi yang dikemukakan oleh para akademisi, jurnalis, maupun praktisi politik luar negeri India yang menyebutkan bahwa relasi khusus yang terjadi antara New Delhi dengan Yangon disebabkan oleh dua hal utama, yang pertama karena hubungan kedua negara dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik kedua negara, dan yang kedua dikarenakan rivalitas India dengan Cina yang terus memperluas pengaruh di Myanmar. Dalam jurnal Bhaskar Roy<sup>12</sup> yang berjudul *Myanmar General's Visit-India's Interest and Security Prime*, tertulis bahwa penerima manfaat terbesar dari isolasi yang dilakukan oleh negara-negara barat kepada Myanmar adalah Cina yang merupakan pelindung utama Myanmar di forum-forum PBB dengan hak vetonya. Negara-negara barat hanya melihat Myanmar sebagai negara yang sangat buruk sehingga tidak mencoba cara pendekatan lain untuk merubah Myanmar menjadi negara demokratis.

Di sisi lain Cina mendapatkan posisi yang cukup istimewa di Myanmar. Selain sebagai pendukung, sistem pertahanan Myanmar juga dipasang oleh Cina dengan harga “persahabatan”. Dukungan-dukungan yang diberikan kepada Myanmar membuat Cina mampu mendapatkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur utama di Myanmar seperti pembangunan pelabuhan, bandara, penggalian minyak bumi & gas alam, serta mineral. Cina juga berhasil membentang pipa minyak bumi dan gas alam dari pelabuhan Myanmar di samudera hindia hingga ke Kunming di Cina untuk mempermudah proses transportasi energi bagi Cina<sup>13</sup>. Roy berpandangan bahwa India tidak bisa menerima Myanmar, yang berada di perbatasan langsung dengan India, dipengaruhi dengan sangat kuat oleh Cina<sup>14</sup>. Demikian juga pandangan yang coba disampaikan oleh John H. Badgley<sup>15</sup> dalam jurnal *Strategic Interests in Myanmar*. Badgley memaparkan bahwa selama setengah abad terakhir,

---

<sup>11</sup> U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control, “An Overview of the Burmese Sanctions Regulations Title 31 Part 537 of the U.S. Code of Federal Regulations” dalam *What You Need to Know About U.S. Sanctions Against Burma (Myanmar)*, (Washington, D.C., 5 Desember 2008), 1.

<sup>12</sup> Bhaskar Roy adalah seorang filosof Inggris serta sarjana ilmu filosofi, politik, dan ekonomi dari Universitas Oxford, Balliol College.

<sup>13</sup> Bhaskar Roy, “Myanmar General's Visit-India's Interest and Security Prime” [internet] [http://indianstrategicknowledgeonline.com/hc.php?fnam=papers40\\_paper3942.pdf&titl=Myanmar%20Generals%20Visit%20%96%20Indias%20Interests%20And%20Security%20Prime&nam=Myanmar](http://indianstrategicknowledgeonline.com/hc.php?fnam=papers40_paper3942.pdf&titl=Myanmar%20Generals%20Visit%20%96%20Indias%20Interests%20And%20Security%20Prime&nam=Myanmar), 1. Diakses pada 8 November 2013

<sup>14</sup> Bhaskar Roy, “Myanmar General's Visit-India's Interest and Security Prime”, 3.

<sup>15</sup> John H. Badgley adalah sarjana dari Cornell University dan University of Washington. Sebelumnya dia adalah dosen tamu di Rangoon University, Kyoto University, Shanghai International Studies University, Miami University, dan Johns Hopkins University. Publikasinya yang berkaitan dengan Myanmar meliputi: *LICUS Assessment of Myanmar (2002)*, *Asian Development: Problems and Prognosis (1971)*, dan *Politics Among Burmans: A Study of Intermediary Leadership (1970)*. Dia meraih gelar doktor dari University of California-Berkeley.

Myanmar tidak menimbulkan ancaman keamanan bagi India, namun hubungan dengan India menjadi rumit ketika Myanmar menandatangani perjanjian-perjanjian bantuan militer dengan Cina. Badgley memandang bahwa kunjungan wakil presiden India, Bhairon Singh Shekhawat, ke Myanmar pada November 2003 merupakan salah satu usaha India untuk memulihkan hubungan baik dengan Myanmar serta mencegah Myanmar jatuh seluruhnya ke dalam pengaruh Cina<sup>16</sup>. Badgley menganggap kunjungan Shekhawat ke Myanmar juga sebagai usaha *de facto* India untuk menyeimbangkan kunjungan presiden Jiang Zemin ke Myanmar pada 2001.

Pandangan lain juga diberikan oleh Ramtanu Maitra yang merupakan seorang jurnalis dari Indian Defence Review yang menulis dalam jurnal yang berjudul *The Strategic Importance of Myanmar for the Region and Beyond* bahwa dalam beberapa tahun terakhir India telah menjalin hubungan politik, ekonomi, dan militer dengan junta militer Myanmar. India memiliki kepentingan bisnis dengan Myanmar yang memiliki deposit minyak bumi dan gas alam yang cukup besar. Salah satu perusahaan BUMN India, National Hydro Power Company Limited, berencana untuk berinvestasi sebesar \$ 5,6 milyar di Myanmar untuk memperluas sektor energi India<sup>17</sup>.

Selain itu, salah satu kekhawatiran India adalah ketidakstabilan kondisi kelompok negara bagian di wilayah timur laut India yang selama puluhan tahun terjebak kemiskinan. Untuk memastikan pertumbuhan yang tinggi dan tanpa gangguan, India harus memperkuat perekonomian di perbatasan dengan Myanmar dan memaksimalkan penggunaan lautan untuk membawa sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan di wilayah perbatasan<sup>18</sup>. India telah membangun jalan raya sepanjang 160 km dari perbatasan Manipur melalui Tamu, Kalewa, dan Kalemmyo serta ikut membantu dalam proyek jalan tol trilateral yang menghubungkan Moreh di Manipur ke Mae Sot di Thailand melalui Bagan di Myanmar untuk membuka wilayah timur laut India ke wilayah perdagangan internasional. India dan Myanmar juga bekerjasama dalam proyek multimodal di Kaladan untuk membangun fasilitas transportasi yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara pelabuhan India di pantai timur dan pelabuhan Sittwe di Myanmar. Pembangunan sarana transportasi akan semakin mempermudah mobilitas bagi masyarakat di perbatasan kedua negara,

---

<sup>16</sup> John H. Badgley, "Strategic Interests in Myanmar", dalam *Reconciling Burma/Myanmar: Essays on U.S. Relations with Burma*, (Seattle: Maret 2004), 20.

<sup>17</sup> Ramtanu Maitra, "The Strategic Importance of Myanmar for the Region and Beyond", [internet] [http://fsss.in/agni-volume/The\\_Strategic\\_Importance\\_of\\_Myanmar\\_forthe\\_Region\\_and\\_Beyond.pdf](http://fsss.in/agni-volume/The_Strategic_Importance_of_Myanmar_forthe_Region_and_Beyond.pdf), 6. Diakses pada 8 November 2013

<sup>18</sup> Ramtanu Maitra, "The Strategic Importance of Myanmar for the Region and Beyond", 7.

baik melalui sungai maupun jalan raya menuju Mizoram, yang juga berfungsi sebagai rute alternatif untuk transportasi barang ke wilayah timur laut India<sup>19</sup>.

Di era pemerintahan Manmohan Singh yang pertama, hubungan kedua negara terlihat semakin intens dibandingkan dari masa-masa pemerintahan sebelumnya. Kedekatan kedua negara bisa dilihat dari semakin beragamnya perjanjian-perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pemimpin kedua negara di era pemerintahan Singh. Pada tahun 2004 sebuah Komite Perdagangan Bersama didirikan oleh kedua negara yang diketuai oleh menteri perdagangan India dan Myanmar dan telah bertemu sebanyak 4 kali untuk meninjau perdagangan dan investasi. Pada tahun 2008, untuk memperkuat hubungan perdagangan yang sudah ada, ditandatangani pula perjanjian *Bilateral Investment Promotion Agreement* (BIPA) dan *Double Taxation Avoidance Agreement* (DTAA)<sup>20</sup>. Kemudian di bidang infrastruktur, India menyetujui kerjasama pembangunan proyek transportasi multimodal Kaladan yang merupakan proyek terbesar India di Myanmar sebesar \$ 120 juta. Kemudian pada 2008, India dan Myanmar setuju untuk menandatangani perjanjian yang juga termasuk peningkatan kapasitas pelabuhan Sittwe, pengerukan sungai Kaladan untuk memungkinkan akses perahu dari Sittwe ke pelabuhan yang lebih jauh ke dalam di Kaletwa, dan pembangunan jalan penghubung Kaletwa dengan perbatasan negara bagian Mizoram di India. Seluruh proyek pembangunan di Kaladan didanai oleh kementerian luar negeri India dan konstruksi pelabuhan dilaksanakan oleh Inland Waterways Authority of India Ltd. Pada tahun yang sama pula kementerian tenaga listrik Myanmar dan NHPC (perusahaan BUMN India) menandatangani perjanjian untuk mengembangkan proyek PLTA di sungai Chindwin<sup>21</sup>. Di bidang pendidikan, pada tahun 2008 pula kedua negara setuju untuk membangun *The India Myanmar Centre for Enhancement of IT Skills* yang berlokasi di Yangon yang pada tahun 2009 dilanjutkan dengan pembukaan *The Myanmar-India Entrepreneurship Development Centre*<sup>22</sup>.

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan disetujui menandakan hubungan kedua negara yang semakin intens di era pemerintahan Manmohan Singh. Hubungan dekat kedua negara terus dipraktekkan oleh India meski berlawanan dengan tendensi umum masyarakat internasional terhadap Myanmar.

---

<sup>19</sup> Ramtanu Maitra, "The Strategic Importance of Myanmar for the Region and Beyond", 8-9.

<sup>20</sup> Gareth Price, "India's Policy Towards Burma", (London: Chatham House, 2013), 3.

<sup>21</sup> Gareth Price, "India's Policy Towards Burma", 4-5.

<sup>22</sup> Gareth Price, "India's Policy Towards Burma", 9.

## **Kepentingan Kerjasama Energi India-Myanmar**

Pada tahun 2009, India menduduki peringkat ketiga dunia dalam kebutuhan terhadap energi, dibelakang Cina dan Amerika Serikat. Sumber energi primer terbesar India pada tahun 2009 adalah batubara dengan pangsa pasar sebesar 42 persen dari total penggunaan energi India yang diikuti oleh *biomass* dengan total pangsa 25 persen, minyak bumi mendapatkan pangsa pasar sebanyak 24 persen dan gas alam mendapatkan pangsa pasar sebesar 7 persen<sup>23</sup>. Penggunaan sumber energi *biomass* turun cukup signifikan pada tahun 2009, dimana pada tahun 1990 sumber *biomass* masih memegang pangsa pasar sebesar 46 persen. Penurunan penggunaan *biomass* menunjukkan bahwa masyarakat India telah beralih menggunakan sumber energi yang lebih modern dan efisien. *World Energi Outlook 2011* juga turut menunjukkan bahwa permintaan India terhadap energi telah berlipat ganda dari tahun 1990 sebesar 319 juta mtoe (*million tones of oil equivalent*) meningkat tinggi pada 2009 menjadi sebesar 669 mtoe<sup>24</sup>. Kebutuhan energi India diestimasi akan mencapai 1464 mtoe di tahun 2035<sup>25</sup>. Konsumsi gas alam India juga telah mencapai 180 juta scm (*standard cubic meters*) per hari dengan pertumbuhan permintaan sebesar 4,5 persen per tahun dimana produksi gas alam domestik hanya mampu menutup kebutuhan sebanyak 80 juta scm. Gas alam juga tercatat sebagai sumber energi dengan pertumbuhan permintaan tercepat sebesar 7 persen per tahunnya<sup>26</sup>.

Pemerintah India semakin mengintensifkan impor energi demi memenuhi kebutuhan energi India. Sejak tahun 1990 hingga 2009, total impor energi meningkat dari 34 mtoe menjadi 236 mtoe yang menunjukkan peningkatan ketergantungan impor energi India dari 11 persen menjadi 35 persen. Pada tahun 1990, India hanya mengimpor minyak bumi sebanyak 21 mtoe dan tidak mengimpor gas alam sama sekali, namun pada tahun 2009 impor gas alam India telah mencapai 10 mtoe atau 21 persen dari jumlah total permintaan gas alam di India pada 2009<sup>27</sup>. Sumber terbesar dari kenaikan impor energi India adalah impor minyak bumi yang menyumbang sebesar 70 persen dari total kenaikan. Volume absolut impor minyak bumi India telah mencapai 162 mtoe atau 81 persen dari jumlah total permintaan minyak pada tahun 2009 di India. Minyak bumi menyumbang 24 persen dari total permintaan energi primer India pada tahun 2009 sedangkan permintaan gas alam di India mencapai 65 milyar meter kubik dan menyumbang 7 persen dari

---

<sup>23</sup> International Energi Agency, *Understanding Energy Challenges in India*, (Paris, 2012), 26

<sup>24</sup> International Energi Agency, *Understanding Energy Challenges in India*, 24

<sup>25</sup> Devindar Kumar, *Securing India's Energi Future*, (Australian Defence College, 2011), 5.

<sup>26</sup> Namrata Panwar, *India and China Competing Over Myanmar Energi Resources*, (Leicester, 2009), 7.

<sup>27</sup> International Energi Agency, *Understanding Energy Challenges in India*, 27.

total permintaan energi primer<sup>28</sup>. Ringkasnya, kebutuhan energi India diperkirakan akan meningkat sebesar 3,1 persen per tahun selama periode 2009 hingga 2035, yang merupakan pertumbuhan permintaan energi tercepat di dunia<sup>29</sup>.

India tidak lagi memiliki sumber energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan kelangkaan akan berakibat pada peningkatan ketergantungan terhadap impor energi, terutama dari wilayah Timur Tengah. Ketergantungan dari Timur Tengah berakibat pada keharusan India untuk memastikan keamanan wilayah laut (*SLOCs-Sea Lines of Communications*) yang memfasilitasi jalur impor energi India<sup>30</sup>. Sampai 2009, India mengimpor 74 persen minyak bumi dari negara-negara di Timur Tengah<sup>31</sup> dan pemasok minyak mentah utama India adalah Arab Saudi sebesar 18 persen, diikuti oleh Iran sebesar 11 persen, dan Kuwait sebesar 9 persen<sup>32</sup>. Ketergantungan India terhadap sumber energi di Timur Tengah menyebabkan India harus mematuhi aturan dan bergantung pada mekanisme pasar yang, jika terjadi gejolak sedikit saja di Timur Tengah, dapat menyebabkan fluktuasi harga dan berdampak langsung terhadap impor energi India<sup>33</sup>. Selain itu, hubungan India dengan negara tetangga Pakistan merupakan rintangan terbesar bagi India untuk mengekstrak sumber daya energi dari Timur Tengah melalui jalur darat sehingga India sangat bergantung pada jalur laut melalui Samudera Hindia untuk mendapatkan minyak dari Timur Tengah dan Afrika. Namun India juga mendapatkan tantangan besar di Samudera Hindia untuk membawa energi yang telah diimpor karena keberadaan perompak laut dan kejahatan-kejahatan transnasional lain yang menghambat suplai bagi India<sup>34</sup>. Untuk menghindari ketergantungan terhadap sumber energi di satu negara atau wilayah tertentu, India melakukan diversifikasi impor dari semua kemungkinan termasuk dengan Myanmar. Myanmar dipandang pemerintah India sebagai opsi yang sangat bagus bagi kebutuhan energi India karena selain Myanmar memiliki sumber minyak bumi dan gas alam yang masih belum di eksplorasi banyak negara, perbatasan darat dengan India memungkinkan pendistribusian energi melalui jalur darat yang aman dan cepat<sup>35</sup>.

Myanmar memiliki sumber energi yang cukup besar. Di bidang gas alam, tercatat Myanmar memiliki deposit (*proven reserves*) mencapai

---

<sup>28</sup> International Energi Agency, *Understanding Energy Challenges in India*, 58

<sup>29</sup> Devindar Kumar, *Securing India's Energi Future*, 11.

<sup>30</sup> Devindar Kumar, *Securing India's Energi Future*, 11.

<sup>31</sup> Devindar Kumar, *Securing India's Energi Future*, 7.

<sup>32</sup> International Energi Agency, *Understanding Energy Challenges in India*, 62.

<sup>33</sup> Namrata Panwar, *India and China*, 6.

<sup>34</sup> Namrata Panwar, *India and China*, 7.

<sup>35</sup> Namrata Panwar, *India and China*, 7.

total 11,8 TCF (*trillion cubic feet*). Pada tahun 2009 saja, ekspor energi Myanmar mencapai 7,7 mtoe yang setara dengan hampir setengah dari total keseluruhan produksi energi Myanmar pada tahun tersebut. Sepertiga dari total \$ 13,6 milyar *Foreign Direct Investment* (FDI) yang ditanam di Myanmar juga berada pada sektor minyak dan gas alam. Kemudian potensi pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang menggunakan empat sungai utama Myanmar (Ayeyarwaddy, Chindwin, Thanlwin, dan Sittaung) diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 megawatt (MW). Sebanyak 92 proyek PLTA potensial yang berskala besar juga telah berhasil diidentifikasi di Myanmar dengan total kapasitas terpasang sebesar 46.101 MW, namun sampai sejauh ini pemerintah Myanmar hanya mampu memanfaatkan kurang dari 10 persen dari total potensi PLTA<sup>36</sup>.

Berdasarkan data dari World Energy Council (WEC), pada tahun 2007 diestimasi bahwa Myanmar memiliki cadangan batubara sekitar 2 juta ton yang sejak 1988 hingga Januari 2009 sebanyak 8,323 juta ton batubara telah berhasil ditambang oleh pemerintah Myanmar<sup>37</sup>. Myanmar memiliki deposit gas alam sebesar 447,7 TCF dimana 428 TCF di darat dan 19,7 TCF sisanya di lepas pantai, dan cadangan minyak bumi sebesar 206,9 juta barel (MMbbl) dimana 106 MMbbl berada di darat dan 100,9 MMbbl di lepas pantai Myanmar. Untuk dapat sepenuhnya memanfaatkan potensi besar sektor energi Myanmar, dibutuhkan pendekatan-pendekatan strategis seperti mengundang ahli-ahli teknis asing yang mampu memaksimalkan potensi energi dan ikut berpartisipasi dalam optimalisasi sektor minyak bumi, gas alam, dan PLTA di Myanmar<sup>38</sup>.

Kebutuhan energi yang besar membuat India juga berusaha merebut kesempatan mengeksplorasi di Myanmar. Pada bulan Agustus tahun 2000, Daewoo International bermitra dengan Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) untuk mengeksplorasi dan mengembangkan deposit gas alam di daerah Teluk Bengal di lepas pantai Arakan. Pada tahun 2004, Daewoo International mengumumkan penemuan gas di blok Shwe di lepas pantai Sittwe, ibukota negara bagian Arakan. Uji pengeboran yang dilakukan oleh Daewoo International mengindikasikan adanya cadangan gas alam sebesar 3,56 TCF atau lebih. Mitra utama dalam proyek ini adalah Daewoo International, Korean Gas Corporation, India's Oil and Natural Gas Corporation, dan Gas Authority of India Ltd (GAIL)<sup>39</sup>. Selanjutnya, konsorsium mitra pengeboran minyak bumi dan gas alam yang terdiri dari Oil and Natural Gas Corporation Videsh, GAIL

---

<sup>36</sup> Asian Development Bank, *Myanmar: Energy Sector*, 2-3.

<sup>37</sup> Asian Development Bank, *Myanmar: Energy Sector*, 6.

<sup>38</sup> Asian Development Bank, *Myanmar: Energy Sector*, 4.

<sup>39</sup> Asian Development Bank, *Myanmar: Energy Sector*, 11.

India, Daewoo, dan Korean Gas Corporation juga telah menginvestasikan dana sebesar US\$ 2,8 milyar untuk mengembangkan ladang pengeboran minyak dan gas di Myanmar. Konsorsium ini berencana untuk menanamkan lebih dari \$ 936 juta untuk memasang pipa bawah laut untuk mengangkut gas hasil pengeboran ke darat<sup>40</sup>.

Di sektor minyak bumi, Myanmar termasuk negara yang memiliki kilang minyak dan tempat penyulingan minyak bumi yang cukup tua. Usia tua berdampak pada prosentase operasi kilang menjadi cukup rendah dari yang seharusnya, dampaknya berkisar antara 33 persen hingga 57 persen. India menangkap kesempatan ini untuk memaksimalkan produksi minyak bumi Myanmar dengan melakukan kerjasama peningkatan kemampuan penyulingan kilang Myanmar. Untuk meningkatkan kemampuan kilang Thanlyin, Myanmar yang diwakili oleh perusahaan Myanmar Petrochemical Enterprise (MPE) menjalin kontrak dengan Angelique of India, yang didukung dengan bantuan keuangan dari pemerintah India sebesar \$ 20 juta. Selain itu, kontrak kerjasama lain yang juga telah ditandatangani antara pemerintah Myanmar dengan perusahaan India adalah kerjasama antara MPE dengan Novatech Process Equipment. Kerjasama MPE dan Novatech dijalin untuk merenovasi dan menambah kapasitas kilang Mann-Thanbayakan, juga dengan bantuan finansial dari pemerintah India<sup>41</sup>.

### **Kepentingan Penghapusan Kemiskinan di India Timur Laut (ITL)**

Sejatinya, wilayah ITL termasuk wilayah di India yang mengandung kekayaan alam yang berlimpah, namun karena kurangnya infrastruktur, sistem transportasi, dan sistem komunikasi yang layak, sebagian besar sumber daya yang ada di wilayah ITL belum bisa dimanfaatkan yang berdampak pada stagnasi perekonomian wilayah ITL<sup>42</sup>. Standar hidup masyarakat India di wilayah ITL, yang diukur melalui *gross state domestic product* (GSDP), telah tertinggal secara signifikan di belakang GDP Per kapita nasional. Pada tahun 2008-2009, pendapatan per kapita nasional mencapai 41.968 rupee dimana pendapatan per kapita rata-rata negara bagian di wilayah ITL masih sekitar 21.000 rupee, hampir setengah dari pendapatan per kapita nasional, dan demikian pula tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita wilayah ITL juga tertinggal dari cepatnya pertumbuhan pendapatan per kapita nasional<sup>43</sup>. Masyarakat wilayah ITL tidak mendapatkan akses terhadap layanan-

---

<sup>40</sup> Asian Development Bank, *Myanmar: Energy Sector*, 12.

<sup>41</sup> Asian Development Bank, *Myanmar: Energy Sector*, 14.

<sup>42</sup> N. Bhupendro Singh, *Globalization and North East India*.

<sup>43</sup> Ministry of Development of North Eastern Region, *Expansion of North East India's Trade and Investment with Bangladesh and Myanmar*, (Oktober 2011), 19.

layanan dasar yang memadai. Beberapa indikator pembangunan dasar seperti panjang jalan raya, akses pelayanan kesehatan, dan konsumsi listrik masih berada dibawah rata-rata nasional. Wilayah ITL hanya menghasilkan kurang dari 8 persen dari total 63.257 MW energi potensial yang bisa dibangkitkan. Konsumsi energi per kapita di wilayah ITL pun hanya sebesar 110 kwh, hampir seperempat dari konsumsi energi rata-rata nasional India yang sebesar 411 kwh. Bahkan di wilayah-wilayah tertentu seperti negara bagian Assam, Manipur, dan Nagaland, konsumsi energi masih jauh dibawah rata-rata wilayah ITL sendiri yaitu sebesar 85 kwh untuk Assam, 70 kwh untuk Manipur, dan 87 kwh untuk Nagaland. Lambatnya industrialisasi dan terbatasnya kemampuan penduduk untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang produktif mengakibatkan tingkat pengangguran di wilayah ITL menjadi sangat tinggi<sup>44</sup>.

Sektor industri di wilayah ITL juga berada dalam keadaan yang sangat buruk yang berpengaruh pada kondisi mesin-mesin yang digunakan dalam pertanian yang usianya sudah cukup tua dan berakibat pada produksi pangan yang terus menurun<sup>45</sup>. Dalam hal perindustrian di India, kondisi wilayah ITL digambarkan sebagai kawasan yang paling terbelakang<sup>46</sup>. Beberapa faktor penyebab keterbelakangan industri dikarenakan lokasi wilayah ITL yang sangat diujung dan terpencil, serta persaingan yang ketat dengan industri di daratan utama India yang memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana-sarana penting seperti dukungan keuangan, teknologi, dan manajemen yang membuat perusahaan manufaktur di negara bagian timur laut ini mengalami fase deindustrialisasi<sup>47</sup>. Dengan tidak adanya industri-industri besar dan kesempatan kerja yang kecil, tingkat pengangguran di wilayah ITL tidak hanya tinggi tapi juga meningkat dengan cepat, khususnya pengangguran di tingkat pemuda perkotaan yang berpendidikan. Berdasarkan *Current Daily Status* (CDS) India, tingkat pengangguran di wilayah perkotaan tertinggi dipegang oleh negara bagian Tripura yang diikuti oleh negara bagian Assam yang memiliki prosentase pengangguran lebih tinggi daripada tingkat pengangguran nasional. Di negara bagian sisanya volume pengangguran secara absolut masih terus tumbuh naik<sup>48</sup>.

Selain banyaknya pengangguran dan kurangnya kondisi infrastruktur yang memadai, sedikitnya FDI yang mengalir ke wilayah ITL semakin memperparah kondisi yang sudah serba kekurangan. Selama Januari

---

<sup>44</sup> Ministry of Development, *Expansion of North East*, 21.

<sup>45</sup> Purusottam Nayak, *Human Development Reports on North-East India: A Bird's Eye View*, (Shillong, 30 Agustus 2009), 5.

<sup>46</sup> N. Bhupendro Singh, *Globalization and North East India*. 8.

<sup>47</sup> N. Bhupendro Singh, *Globalization and North East India*. 8.

<sup>48</sup> N. Bhupendro Singh, *Globalization and North East India*. 9.

2000 hingga Maret 2004, wilayah ITL menerima total FDI sebesar \$ 9 juta atau hanya 0,04 persen dari total FDI yang masuk ke India. Kurangnya infrastruktur tidak hanya merusak prospek pembangunan wilayah, namun juga telah menciptakan pengelompokan horizontal terhadap etnis-etnis di sana. Semua warga di wilayah ITL terkunci di dalam wilayahnya masing-masing dan tidak dapat berhubungan karena sistem transportasi yang buruk. Kurangnya sarana transportasi berdampak pada ketidak mampuan setiap wilayah untuk melakukan kerjasama pembangunan regional secara efektif<sup>49</sup>.

Sangat sulit bagi pemerintah India untuk membangun wilayah yang pertumbuhannya sangat bergantung dari dukungan pusat, oleh karena itu pemerintah India memilih membuka perdagangan perbatasan sebagai cara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah ITL. Perdagangan melalui perbatasan merupakan sebuah solusi yang cukup berguna untuk menggerakkan perekonomian wilayah ITL. Tercatat selama periode 1987-1988, dimana India masih mendukung gerakan demokrasi di Myanmar, perdagangan perbatasan kedua negara hanya mencapai 1,7 persen dari total perdagangan India. Namun selama 2003-2004 perdagangan perbatasan berkembang pesat hingga menyentuh 8 persen dari total perdagangan India<sup>50</sup>.

Perubahan kebijakan India terhadap Myanmar memberikan manfaat positif bagi India. Pembukaan perdagangan perbatasan antara kedua negara yang dimulai pada tahun 1995 menjadi titik awal perdagangan bilateral yang naik tajam terutama setelah Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997 dan tahun-tahun selanjutnya. Perdagangan bilateral antara India dan Myanmar telah berkembang dari hanya sebesar \$ 12 juta pada tahun 1980 menjadi \$ 1,5 milyar pada tahun 2009, yang menandakan peningkatan pesat sebesar 46 persen dalam dua dekade terakhir.<sup>51</sup> Perjanjian perdagangan perbatasan ditandatangani oleh India dan Myanmar pada tahun 1994 sebagai kerangka hukum atas perdagangan yang terjadi antar kedua negara yang sekaligus menandakan telah dibukanya perdagangan perbatasan yang diakui secara resmi oleh kedua negara yang selanjutnya diikuti oleh operasionalisasi Stasiun Bea dan Cukai di Manipur (India) dan Tamu (Myanmar) pada 1995. Pada tahun 2004, mengikuti perjanjian perbatasan yang disepakati tahun 1994, dibuka lagi titik perdagangan perbatasan kedua di Mizoram (India) dan Rhi (Myanmar). Sejak 2008, India dan Myanmar telah sepakat untuk meningkatkan status perdagangan perbatasan kedua negara menjadi termasuk dalam perdagangan normal dan memperluas jenis barang yang

---

<sup>49</sup> N. Bhupendro Singh, *Globalization and North East India*, 9.

<sup>50</sup> N. Bhupendro Singh, *Globalization and North East India*, 12.

<sup>51</sup> Ministry of Development, *Expansion of North East*, 50-51.

diperdagangkan dari 18 jenis menjadi 40 jenis, sekaligus juga diambil keputusan untuk mengoperasionalkan pengaturan perbankan yang baru yang digunakan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan India-Myanmar. Berdasarkan data dari Departemen Perdagangan Perbatasan Myanmar, omset perdagangan perbatasan kedua negara telah mencapai sekitar US\$ 10 juta hingga US\$ 22 juta yang akan lebih tinggi jika perdagangan perbatasan tidak resmi juga diperhitungkan<sup>52</sup>. Hampir semua barang yang diizinkan untuk diperdagangkan pada titik-titik perbatasan diberi harga *most favoured nation* oleh pedagang kedua negara<sup>53</sup>.

Perdagangan perbatasan di Manipur tercatat sebagai zona perdagangan perbatasan tersibuk dimana ekspor India melalui titik Manipur meningkat dari hanya \$ 0,1 juta pada tahun 1995-1996 menjadi \$ 13,5 juta pada tahun 2006-2007<sup>54</sup>. Ekspor melalui Moreh meningkat cukup tajam dari hanya US\$ 0,14 juta pada tahun 1995-1996 meningkat hingga puncaknya pada tahun 2006-2007 senilai US\$ 13,52 juta. Perkembangan yang cukup menarik dapat dilihat bahwa dalam dua dekade terakhir ekspor terus menanjak naik dibandingkan dua dekade sebelumnya sedangkan impor menurun secara konsisten dari US\$ 72 milyar pada periode 1995-1996/1999-2000 menurun menjadi US\$ 38 milyar pada periode 2005-2006/2009-2010<sup>55</sup>. Hambatan-hambatan seperti tidak tersedianya listrik, kondisi jalan yang buruk, penanganan barang yang masih dilakukan secara manual, nilai tukar mata uang yang “tidak ramah” pada dasarnya membuat perdagangan di perbatasan menjadi urusan yang mahal yang mengakibatkan perdagangan resmi (*normal trade*) di wilayah ITL tidak tumbuh dan berakibat pada merajalelanya perdagangan informal<sup>56</sup>. Kemudian biaya transaksi yang tinggi yang diakibatkan oleh buruknya sistem transportasi dan kurangnya infrastruktur yang menghubungkan wilayah ITL dengan negara bagian India yang lain juga semakin membuat kondisi di wilayah ITL terisolir. Karena perdagangan pasar dalam negeri terlalu banyak memiliki rintangan, pasar di perbatasan dengan Myanmar dianggap dapat bertindak sebagai celah untuk mengembangkan perekonomian di wilayah ITL<sup>57</sup>.

Sejumlah inisiatif telah diambil oleh negara-negara Asia Selatan dan Asia Tenggara untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi baik regional maupun sub-regional dengan membentuk sebuah kawasan ekonomi yang termasuk kerjasama *South Asian Association of Regional*

---

<sup>52</sup> Research and Information System, *India-Myanmar*, 3.

<sup>53</sup> Ministry of Development, *Expansion of North East*, 14-15.

<sup>54</sup> Ministry of Development, *Expansion of North East*, 4.

<sup>55</sup> Ministry of Development, *Expansion of North East*, 57-58.

<sup>56</sup> Ministry of Development, *Expansion of North East*, 4.

<sup>57</sup> Ministry of Development, *Expansion of North East*, 12.

*Cooperation* (SAARC), *Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation* (BIMSTEC), dan *Asia Pacific Trade Agreement* (APTA). India sendiri juga termasuk sebagai anggota dalam negara-negara yang tergabung dalam *East Asia Summit* (EAS) yang menghubungkan India dengan ASEAN dan negara-negara Asia Timur. Semua inisiatif kerjasama ini tidak mungkin dapat dengan sempurna dilaksanakan India tanpa wilayah IITL memegang peranan penting sebagai wilayah poros utama. Di antara negara-negara yang berbatasan langsung dari wilayah IITL, Myanmar memiliki signifikansi khusus. Posisi yang berada di Teluk Bengal membuat Myanmar menjadi pintu bagi India menuju perekonomian di Asia Tenggara dan Asia Timur, oleh karena itu konektivitas yang efektif dengan Myanmar merupakan hal yang utama dalam kebijakan luar negeri India<sup>58</sup>.

### **Kerjasama dan Pengaruh Cina di Myanmar**

Kerjasama Myanmar dengan Cina dimulai pada bulan Oktober tahun 1989<sup>59</sup> yang ditandadi dengan kunjungan wakil ketua SPDC, Jenderal Senior Than Shwe, dan sekretaris pertama SPDC, Jenderal Khin Nyunt, ke Cina dalam misi untuk mencari bantuan ekonomi dan militer bagi Myanmar yang berujung pada persetujuan Cina untuk membantu Myanmar. Sejak akhir 1989 hubungan kedua negara terus berkembang. Sebagai salah satu negara yang bertetangga dengan Cina, Myanmar memainkan peran strategis dalam usaha Cina untuk mencapai stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Cina memiliki 3 kepentingan strategis utama di Myanmar yaitu; keamanan pengadaan dan suplai sumber energi, akses menuju Samudera Hindia, dan pengamanan wilayah perbatasan serta pengembangan perdagangan perbatasan<sup>60</sup>.

Bagi Cina, posisi Myanmar sangat signifikan secara geopolitik karena keamanan jalur perdagangan perbatasan dan stabilitas wilayah perbatasan Cina-Myanmar merupakan salah satu kepentingan utama yang dikejar Cina. Myanmar merupakan mitra dagang terbesar provinsi Yunnan, dan bagi Myanmar perdagangan perbatasan juga berfungsi sebagai jalur arteri logistik bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari Myanmar. Rasio perdagangan perbatasan dengan Myanmar menyumbang sekitar 60 persen dari total ekspor Cina ke Myanmar, dan sekitar 80 persen dari total impor di tahun 2005. Selanjutnya, usaha untuk mengakuisisi sumber daya alam yang dimiliki Myanmar menjadi semakin penting bagi Cina karena pesatnya pertumbuhan industri dan

---

<sup>58</sup> Ministry of Development, *Expansion of North East*, 13.

<sup>59</sup> Myanmar mendapat tekanan tinggi dan dikucilkan dari dunia internasional sejak 1988 karena pembantaian yang dilakukan oleh junta militer Myanmar kepada gerakan demokrasi yang menuntut reformasi pemerintahan pada Pemberontakan 8888.

<sup>60</sup> IDE-JETRO, *China's Policy Toward Myanmar*, 2.

urbanisasi di Cina yang diiringi dengan kenaikan jumlah kebutuhan bahan baku dan energi. Kemudian letak geografis Myanmar yang berbatasan dengan Samudera Hindia dapat memberikan Cina akses langsung menuju perairan internasional bagi provinsi Cina yang terkunci daratan. Cina juga menawarkan kepada Myanmar untuk mengubah daerah di sekitar Kyaukpyu menjadi Zona Ekonomi Khusus yang terhubung ke Cina melalui jalan darat dan jalur kereta api, dalam upaya untuk membuat areal perindustrian di Myanmar yang sejalan dengan kepentingan strategis Cina untuk menghubungkan Cina daratan dengan Samudera Hindia<sup>61</sup>. Strategi Cina yang menggunakan Myanmar sebagai “jembatan” merupakan bagian dari aspirasi Cina untuk tidak hanya mendapatkan akses menuju Samudera Pasifik namun juga Samudera Hindia<sup>62</sup>.

Beberapa kerjasama yang telah dilakukan oleh Cina dan Myanmar mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pemanfaatan minyak bumi dan gas alam, dan pemanfaatan sektor mineral dan pertambangan. Sumber energi dari PLTA di Myanmar menjadi target investasi bagi Cina karena Myanmar memiliki sumber air yang melimpah dan juga murah serta dekat dengan perbatasan sehingga dengan mudah dapat digunakan untuk memenuhi permintaan Cina. Keamanan pengadaan dan suplai energi secara konkrit telah direalisasikan oleh Cina dalam bentuk pembangunan-pembangunan proyek transportasi minyak mentah dan gas alam dari Myanmar melalui pipa menuju Cina serta pembangunan PLTA di daerah perbatasan<sup>63</sup>. Di bidang PLTA setidaknya terdapat 45 perusahaan multinasional Cina yang telah terlibat dalam sekitar 63 proyek pembangkit listrik di Myanmar yang juga termasuk pembangunan gardu-gardu dan saluran transmisi dari proyek terkait pembangunan PLTA. Keterlibatan Cina dalam pembangunan bendungan untuk PLTA di Myanmar sangat luas. Pada tahun 2006 perusahaan Cina, Sinohydro, menandatangani MoU dengan Myanmar senilai US\$ 1 milyar untuk pembangunan bendungan Hat Gyi di sepanjang perbatasan Thailand yang mampu menghasilkan 1.200 MW. Dari semua proyek PLTA di Myanmar, yang terbesar adalah proyek Bendungan Tasang di Sungai Salween yang mampu menghasilkan 7.100 megawatt (MW) dan nantinya akan diintegrasikan dengan jaringan transmisi tenaga listrik *Greater Mekong Sub-region*. Pembangunan bendungan Tasang dimulai pada tahun 2007 oleh perusahaan China Gezhouba Group Co. (CGGC). Pada bulan April tahun 2007, Hanergy Holding Group dan China Gold Water Resources Co. juga menandatangani MoU dengan Myanmar untuk pembangunan PLTA yang berkapasitas 2.400 MW sebagai tambahan untuk Sungai Salween

---

<sup>61</sup> IDE-JETRO, *China's Policy Toward Myanmar*, 3-4

<sup>62</sup> Earth Rights International, *China in Burma*, 3.

<sup>63</sup> IDE-JETRO, *China's Policy Toward Myanmar*, 2.

di bagian hulu. Sungai Salween dilihat begitu potensial oleh Cina sehingga pada bulan April tahun 2008, Sinohydro, China Southern Power Grid Co., dan China Three Gorges Project Co., menandatangani kesepakatan kerjasama strategis untuk pengembangan potensi PLTA dari Sungai Salween<sup>64</sup>. Cina juga memberikan dukungan terhadap pembangunan PLTA di proyek Shweli I, II, dan III di negara bagian Shan yang berbatasan dengan Cina dimana dalam perjanjian dengan Cina, setelah Shweli I beroperasi, sebagian besar daya yang dihasilkan akan dijual ke Cina<sup>65</sup>. Perusahaan Cina, Yunnan Machinery & Equipment Import & Export Co. (YMEC) memulai pembangunan PLTA Shweli I pada bulan Februari tahun 2004 dan, setelah ketidakmampuan Myanmar untuk melanjutkan pendanaan terhadap proyek Shweli, YMEC kemudian bergabung dengan Yunnan Huaneng Lancang River Hydropower Development Co. dan Yunnan Power Grid Co. untuk membuat perusahaan patungan yang bernama Yunnan Joint Power Development Co. (YUPD) pada Agustus 2006 untuk melanjutkan pembangunan PLTA di Shweli<sup>66</sup>.

Kemudian di negara bagian Kachin, beberapa perusahaan multinasional Cina seperti China Power Investment Corporation juga terlibat dalam pembangunan 7 bendungan hidroelektrik yang dibangun di sepanjang sungai N'Mai, Mali, dan Irrawaddy dengan kapasitas terpasang total sebesar 13.360 MW. Pada tahun 2006, YMEC menandatangani MoU dengan Kementerian Tenaga Listrik Myanmar untuk mengembangkan potensi pembangunan PLTA di sungai N'Mai yang pada tahun 2007 dua perusahaan Cina, China Power Investment Co. dan China Southern Power Grid Co., menandatangani perjanjian dengan pemerintah Myanmar yang menyebutkan kesediaan kedua perusahaan untuk membiayai ketujuh bendungan tersebut. Dukungan pemerintah Cina juga terlihat pada pembangunan bendungan Yeywa di Mandalay yang berkapasitas 790 MW yang dimulai pada tahun 2006 dan dibangun serta dibiayai oleh beberapa perusahaan multinasional milik Cina termasuk China Gezhouba Group Co., Sinohydro, China International Trust and Investment Technology Co. (CITIC), China National Electric Equipment Co., China National Heavy Machinery Co., dan Hunan Savoo Oversea Water and Electric Engineering Corporation. Dukungan dan fasilitas pembiayaan untuk pembangunan PLTA di Myanmar juga dibantu oleh China EXIM Bank<sup>67</sup>. Terdapat total 48 rencana pembangunan pembangkit listrik di seluruh Myanmar yang sudah dikonfirmasi untuk dilaksanakan oleh perusahaan Cina<sup>68</sup>.

---

<sup>64</sup> Earth Rights International, *China in Burma*, 5.

<sup>65</sup> IDE-JETRO, *China's Policy Toward Myanmar*, 2.

<sup>66</sup> Earth Rights International, *China in Burma*, 5.

<sup>67</sup> Earth Rights International, *China in Burma*, 6.

<sup>68</sup> IDE-JETRO, *China's Policy Toward Myanmar*, 3.

Di bidang pemanfaatan minyak bumi dan gas alam, setidaknya terdapat 16 perusahaan multinasional Cina yang telah terlibat dalam 21 proyek minyak bumi dan gas alam di daratan dan lepas pantai Myanmar termasuk 3 perusahaan minyak dan gas alam terbesar di Cina yaitu Sinopec, China National Petroleum Corporation (CNPC), dan Cina National Offshore Oil Corporation (CNOOC). Pada tahun 2007, pemerintah junta militer Myanmar mengkonfirmasi penjualan gas alam di blok Shwe di lepas pantai negara bagian Arakan kepada PetroCina dengan harga yang lebih rendah dari para kompetitornya, sehingga memperjelas pengaruh Cina di sektor gas alam Myanmar. PetroCina dan perusahaan induknya, CNPC, telah menandatangani MoU tambahan dengan BUMN Myanmar, Myanmar Oil & Gas Enterprise (MOGE), untuk total eksploitasi 5 blok gas alam lepas pantai di negara bagian Arakan. CNOOC dan anak perusahaannya, Cina National Oil & Gas Development Co. (CNODC), dan Cina Oilfield Services Ltd. (COSL) juga telah menandatangani MoU untuk eksplorasi dan produksi di 6 blok Arakan. Baik PetroCina maupun Sinopec keduanya telah melakukan kegiatan eksplorasi gas alam secara besar di wilayah lepas pantai Arakan pada tahun 2006 dan 2007<sup>69</sup>.

Di samping eksplorasi bahan bakar fosil, CNPC dan Sinopec juga telah memelopori pembangunan pelabuhan laut di pulau Maday dekat dengan Kyaukpyu yang akan digunakan untuk memfasilitasi kapal-kapal tanker Cina yang mengirim minyak mentah melalui Myanmar<sup>70</sup>, sekaligus pembangunan jaringan pipa minyak bumi dan gas alam paralel yang akan membentang sejauh 2.380 km dari pantai Arakan di Myanmar hingga ke kota-kota di barat daya Cina seperti Kunming atau Chongqing. Sinopec telah menandatangani kontrak senilai lebih dari US\$ 1 milyar untuk pembangunan pipa minyak yang diikuti oleh CNPC yang telah menandatangani MoU dengan MOGE untuk melakukan penilaian lebih rinci dari potensi pembangunan terminal minyak mentah di lepas pantai negara bagian Arakan<sup>71</sup>. Jaringan pipa minyak dan gas utama dari pelabuhan Kyaukphyu di negara bagian Sittwe di Myanmar menuju Kunming yang dibangun oleh CNPC akan membuat Cina menjadi penerima gas alam utama yang berasal dari blok Shwe<sup>72</sup>.

Selain pembangunan fasilitas PLTA, minyak bumi, dan gas alam, Cina juga aktif dalam kegiatan pertambangan di Myanmar. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *The Kachin Development Networking Group* dan *The Lahu National Development Organization* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perusahaan China Northern Star,

---

<sup>69</sup> Earth Rights International, *China in Burma*, 7.

<sup>70</sup> IDE-JETRO, *China's Policy Toward Myanmar*, 2.

<sup>71</sup> Earth Rights International, *China in Burma*, 7.

<sup>72</sup> International Crisis Group, *China's Myanmar Strategy*.

Sea Sun Star, dan Standing Company Ltd. terlibat dalam berbagai proyek pertambangan dalam skala kecil di negara bagian Kachin dan Shan. Organisasi *Earth Rights International* juga menemukan bukti keterlibatan 10 perusahaan multinasional Cina di 6 proyek pertambangan besar selama 5 tahun terakhir di Myanmar. Proyek yang terbesar, proyek tambang nikel Tagaung Taung di divisi Mandalay secara mayoritas dikuasai oleh perusahaan China Nonferrous Metal Mining Co. dan merepresentasikan nilai investasi sebesar \$ 600 juta untuk pengekstraksian 40 juta ton biji nikel. Pada tahun 2007, Dewan Reformasi dan Pembangunan China menyetujui proyek tambang biji nikel yang dibarengi dengan persetujuan kementerian pertambangan Myanmar atas hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh perusahaan Cina. Dukungan keuangan pada proyek pertambangan juga diberikan oleh China EXIM Bank dan China Development Bank, serta berkolaborasi dengan China Nonferrous Engineering & Research yang menyediakan desain proyek untuk memulai proses ekstraksi biji nikel. Proyek Tagaung Taung ini disebut sebagai “salah satu upaya kolaboratif terbesar dalam sejarah pertambangan Cina-Myanmar” dan proyek ini juga mendapatkan “perhatian yang tertinggi dari para pemimpin pemerintahan Cina dan Myanmar”<sup>73</sup>. Pada tahun 2007 pula, gunung tambang Pozzolan di divisi Mandalay dimasukkan dalam proyek pertambangan Cina di Myanmar yang melibatkan perusahaan Jiangsu Pengfei Group Corporation. YMEC juga telah menandatangani beberapa perjanjian dengan kementerian pertambangan Myanmar untuk mendapatkan bagian deposit mineral di wilayah Namtu-Bawtwin di negara bagian Shan. Selanjutnya yang terakhir, tambang dan pembangkit listrik tenaga batubara di Tigyt di negara bagian Shan juga ditangani oleh perusahaan China National Heavy Machinery Co. yang juga mengerjakan PLTA di wilayah Kun, Kabaung, dan Yeywa<sup>74</sup>.

### **Usaha India untuk Menyaingi Pengaruh Cina di Myanmar**

Pada bulan November 2003 wakil presiden India, Bhairon Singh Shekhawat, melakukan kunjungan selama 5 hari ke Myanmar. Kunjungan Shekhawat merupakan kunjungan petinggi India yang pertama sejak Rajiv Gandhi mengunjungi Myanmar pada 1987. Kunjungan kenegaraan balasan kemudian dilakukan oleh ketua umum SPDC Myanmar, Jenderal Senior Than Shwe, yang mengunjungi India pada bulan Oktober tahun 2004. Kunjungan Than Shwe merupakan kunjungan tingkat kepala negara pertama dari Myanmar dalam 24 tahun terakhir dan interaksi antar kepala negara Myanmar dan India yang pertama dalam 17 tahun. India juga menyertakan tawaran paket

---

<sup>73</sup> Earth Rights International, *China in Burma*, 8.

<sup>74</sup> Earth Rights International, *China in Burma*, 8-9.

bantuan sebesar \$ 200 juta untuk pembangunan Myanmar saat kunjungan Than Shwe ke India,<sup>75</sup>. Pada bulan Maret tahun 2006, presiden India, A.P.J. Abdul Kalam, kembali membalas kunjungan Than Shwe dengan mengunjungi Myanmar yang juga merupakan kunjungan oleh presiden India yang pertama kali kepada Myanmar. Hubungan baik yang digagas oleh India kepada Myanmar juga menghasilkan jaminan bahwa Myanmar tidak akan mengizinkan negara lain untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Myanmar yang ditujukan untuk membahayakan posisi India<sup>76</sup>.

Dalam bidang infrastruktur, India berjanji untuk membantu Myanmar melakukan pengembangan infrastruktur, yang juga digunakan India sebagai salah satu cara agar Myanmar mulai melepaskan ketergantungan terhadap bantuan-bantuan yang berasal dari Cina. Pada bulan Desember tahun 2007, menyusul pembicaraan antara wakil menteri luar negeri Myanmar, Kyaw Thu dan menteri luar negeri India, Shiv Shankar Menon, India setuju untuk membantu Myanmar mengerjakan berbagai proyek yang saling menguntungkan kedua negara. India telah menandatangani perjanjian kerjasama pembangunan pelabuhan di Sittwe, Myanmar, dengan biaya sebesar \$ 120 juta. Pembangunan ini meliputi tiga komponen, yaitu pembangunan kembali pelabuhan Sittwe, penggalian sungai Kaladan sehingga dapat dilayari hingga negara bagian Mizoram di India, serta mengembangkan konektivitas jalan raya dari perbatasan di Mizoram ke Myanmar.

Hingga 2009 India telah membangun sekitar 200 km jalan raya di seluruh Myanmar<sup>77</sup>. India juga menyediakan bantuan yang sangat dibutuhkan Myanmar setelah Myanmar diterjang oleh Topan Nargis pada tahun 2008 dimana Myanmar menolak berbagai bantuan dari masyarakat internasional lain. Saat ini India merupakan salah satu dari dua pemasok utama peralatan militer bagi Myanmar selain Cina. Pada pertemuan di bulan November tahun 2006 yang terjadi antara menteri pertahanan India, Shekhar Dutt, dan wakil jenderal senior, Maung Aye, India menawarkan Myanmar helikopter beserta Tank T-55, artileri 105mm, pengangkut personel lapis baja, amunisi, dan pembaharuan sistem avionik untuk pesawat buatan Rusia dan Cina milik Myanmar, serta pelatihan anti-pemberontakan bagi tentara Myanmar<sup>78</sup>. Tidak diragukan bahwa keanggotaan tetap Cina di PBB dan hak veto yang dimiliki Cina dipandang Myanmar sebagai faktor yang kuat bagi rezim junta militer Myanmar untuk lebih mendukung dan memihak Cina, namun pada saat yang sama Myanmar juga tidak dapat mengabaikan

---

<sup>75</sup> Renaud Egreteau, *A Passage to Burma? India, Development, and Democratization in Myanmar*, (Desember 2011), 470-471.

<sup>76</sup> Pradip Saikia, *North-East India as a Factor in India's Diplomatic Engagement*, 884.

<sup>77</sup> Renaud Egreteau, *A Passage to Burma?*, 472.

<sup>78</sup> Pradip Saikia, *North-East India as a Factor in India's Diplomatic Engagement*, 884.

India karena kehadiran India secara ekonomi juga berpengaruh terhadap Myanmar dan posisi India yang terus tumbuh sebagai kekuatan regional dianggap mampu mengimbangi kehadiran Cina di Myanmar<sup>79</sup>.

Di bidang perkereta-apian, India memberikan fasilitas kredit senilai \$ 60 juta untuk pengadaan peralatan kereta api bagi perusahaan Myanmar Railways. Bantuan pengadaan kereta api merupakan bantuan tambahan yang sebelumnya pada tahun 2004 India telah memberikan pinjaman kepada Myanmar senilai \$ 56 juta untuk memasok lokomotif sekaligus gerbong penumpang serta memperbaharui jalur kereta api Yangon-Mandalay<sup>80</sup>. Dalam sektor tenaga kelistrikan, India telah berhasil mewujudkan pembangunan dua PLTA utama di wilayah Sagaing. Pada tahun 2004 India menandatangani MoU yang berisi pendanaan proyek bendungan untuk pembangkit listrik Tamanthi dan Shwezaye yang terletak di lembah Hukawun di cekungan sungai Chindwin yang oleh Myanmar diperpanjang lagi pada bulan September tahun 2008. India telah lama mendorong agar kerjasama dapat berkembang lebih erat antara National Hydroelectric Power Corporation (BUMN India) dengan Departemen Implementasi PLTA Myanmar<sup>81</sup>.

India juga membantu Myanmar dalam pemberian ide-ide baru di bidang saintifik, pengiriman ahli-ahli dari India, pengadaan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Myanmar, serta berperan sebagai jendela global untuk Myanmar kepada dunia pro-demokrasi global yang selalu memilih untuk mengucilkan Myanmar.<sup>82</sup> Selama dua dekade terkahir, telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari perdagangan yang terjadi antara Myanmar dan India yang pada tahun 1988-1989 perdagangan kedua negara hanya bernilai \$ 62,15 juta, lalu meningkat pada tahun 2000-2001 menjadi US\$ 345,15 juta, dan mencapai puncaknya pada tahun 2009-2010 senilai US\$ 1,19 milyar<sup>83</sup>. India mengimpor dua pertiga biji-bijian dan kacang-kacangan dari total seluruh produksi Myanmar yang juga dibarengi dengan impor produk kayu-kayuan Myanmar. Di sisi lain, impor Myanmar dari India termasuk produk-produk dari sektor farmasi yang hampir seluruh bidang farmasi Myanmar didominasi oleh perusahaan-perusahaan India seperti Dr. Reddy's Laboratories Ltd. dan Ranbaxy<sup>84</sup>. India juga telah banyak mengembangkan bidang pendidikan tinggi di Myanmar melalui

---

<sup>79</sup> Pradip Saikia, *North-East India as a Factor in India's Diplomatic Engagement*, 886.

<sup>80</sup> Renaud Egreteau, *A Passage to Burma?*, 471-472.

<sup>81</sup> Renaud Egreteau, *A Passage to Burma?*, 472.

<sup>82</sup> Renaud Egreteau, *A Passage to Burma?*, 471

<sup>83</sup> Renaud Egreteau, *A Passage to Burma?*, 474.

<sup>84</sup> Renaud Egreteau, *India's Ambitions in Burma: More Frustration Than Success?*, (Desember 2008), 949.

pemberian *sponsorship* beasiswa PhD dan mengembangkan kapasitas teknologi informasi masyarakat Myanmar<sup>85</sup>.

Terdapat tiga misi utama yang dikejar India untuk menanggulangi kehadiran Cina di wilayah Myanmar dan Samudera Hindia yaitu; misi untuk mendapatkan hak bagi kapal-kapal AL India untuk bersandar dan mengisi bahan bakar di pelabuhan-pelabuhan Myanmar, selanjutnya misi untuk melakukan operasi angkatan laut bersama antara AL India dengan AL Myanmar, lalu terakhir untuk memperoleh data-data intelijen dari segala aktivitas Cina. Bagi Myanmar, sikap India yang mulai mendekatkan diri kepada Myanmar juga membawa keuntungan sendiri karena dengan kedekatan India dan Myanmar, perwira AL Myanmar akan mendapatkan pelatihan yang lebih baik dari India. Hubungan baik dengan AL India juga menjadi jaminan bagi Myanmar di wilayah Teluk Bengal yang dikuasai India. Pada bulan Desember tahun 2002 sebuah armada kecil AL India diizinkan untuk bersandar pertama kalinya di Thaliwa, sebuah pelabuhan yang terletak di dekat kota Yangon yang kemudian juga diikuti oleh dua kapal penjaga pantai India yang merapat di Thaliwa pada bulan Mei tahun 2003. Latihan AL gabungan antara India dengan Myanmar juga berhasil dilaksanakan pada akhir 2003 yang berlokasi di Laut Andaman. Kerjasama AL kedua negara ini terus berlanjut ketika dua kapal perang India membuat *port of call* di pelabuhan Yangon pada bulan Mei tahun 2004 yang dilanjutkan dengan latihan bersama sebanyak dua putaran yang diadakan pada bulan Desember tahun 2005 dan Januari 2006<sup>86</sup>. Lebih jauh lagi, ketika tentara Myanmar memutuskan untuk mendiversifikasi pasokan senjatanya, India datang sebagai penyuplai peralatan militer Myanmar yang baru untuk menyeimbangkan ketergantungan kepada Cina dalam hal pembaharuan persediaan senjata ini. Akademi militer India kini telah mendirikan program bilateral dimana AU India bekerja sama untuk melatih pilot-pilot AU Myanmar<sup>87</sup>.

## Kesimpulan

Hasil temuan penelitian membuktikan kedua argumentasi penulis bahwa kepentingan India menjalin hubungan yang konstruktif dengan Myanmar dikarenakan dua faktor utama; pertama faktor internal India yang terkait dengan kebutuhan energi dan penghapusan kemiskinan di wilayah India Timur Laut, lalu kedua terkait dengan faktor eksternal India yang berkaitan dengan persaingan dengan Cina. Seiring dengan majunya perekonomian India, dibarengi juga dengan naiknya

---

<sup>85</sup> Renaud Egreteau, *A Passage to Burma?*, 477.

<sup>86</sup> Renaud Egreteau, *India's Ambitions in Burma*, 952.

<sup>87</sup> Renaud Egreteau, *India's Ambitions in Burma*, 953.

kebutuhan energi India yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan produksi dalam negeri saja. Melalui impor dari Myanmar yang memiliki cadangan energi melimpah, pemerintah India melakukan diversifikasi sumber impor energi agar tidak bergantung pada suplai dari Timur Tengah yang mudah sekali bergejolak. Selanjutnya, kemiskinan di wilayah India Timur Laut yang lokasinya berbatasan langsung dengan Myanmar juga berperan penting dalam keputusan India untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Myanmar. Wilayah IITL merupakan wilayah dengan tingkat perekonomian yang sangat tertinggal jauh dibandingkan negara bagian India yang lain, nilai rata-rata perekonomian tiap negara bagian di wilayah IITL-pun berada dibawah rata-rata nasional. Wilayah IITL merupakan wilayah paling terbelakang di India yang diperparah dengan kurangnya infrastruktur, angka pengangguran tinggi, serta kemiskinan dimana-mana. Pemerintah India memiliki visi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah IITL agar mampu mengejar ketertinggalan dengan negara bagian India yang lain dengan menjalin hubungan konstruktif dengan Myanmar. India berpandangan bahwa dengan melakukan perdagangan perbatasan, kegiatan perekonomian di IITL dapat berjalan dengan lebih maksimal sehingga mampu memacu pertumbuhan yang berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta dapat mengejar ketertinggalan.

Faktor eksternal yaitu kehadiran Cina di Myanmar berpengaruh pada persepsi ancaman India terhadap Cina. Reformasi ekonomi di Cina dan pemberontakan gerakan pro-demokrasi pada tahun 1988 di Myanmar yang diselesaikan dengan jalur militer membawa Myanmar terkucilkan dari dunia internasional. Cina datang sebagai penolong Myanmar dan segera menjadi pendukung antar satu sama lain yang disebabkan kepentingan bersama. Di satu sisi Myanmar membutuhkan dukungan dan pengakuan Cina juga bantuan dana serta proyek-proyek Cina yang membawa pertumbuhan pembangunan dan pendapatan bagi Myanmar, disisi lain Cina membutuhkan keamanan suplai energi yang bisa didapat dari Myanmar melalui pembangunan jalur pipa dan akses menuju Samudera Hindia melalui Myanmar. Bantuan-bantuan serta proyek-proyek yang diberikan oleh pemerintah Cina untuk Myanmar membawa pengaruh Cina yang cukup besar bagi Myanmar. India khawatir pengaruh Cina yang kuat di Myanmar akan membuat Myanmar nantinya berkembang menjadi negara satelit Cina dimana sejatinya India menganggap Myanmar sebagai *buffer state* alami antara Cina dan India. Pembangunan fasilitas pengumpulan data intelejen oleh Cina juga semakin meningkatkan kekhawatiran India atas intensi Cina di Myanmar. Dengan demikian India juga mengambil sikap untuk menjalin hubungan konstruktif dengan Myanmar melalui berbagai cara termasuk pemberian pinjaman dengan bunga rendah, pembangunan infrastruktur, pengembangan pendidikan, bantuan militer,

pembangkitan sarana kelistrikan, peningkatan perdagangan, serta kunjungan-kunjungan oleh petinggi India yang sekaligus menandai perkembangan hubungan antara India dan Myanmar.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Asian Development Bank, *Myanmar: Energy Sector Initial Assessment*, (Mandaluyong City, Oktober 2012): 1-14.
- Aung, Thin Thin, dan Soe Myint, "India-Burma Relations", dalam *Challenges to Democratization in Burma: Perspective in Multilateral and Bilateral Responses*, ed. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, (Stockholm: International IDEA, 2001): 87-115.
- Badgley, John H., "Strategic Interests in Myanmar", dalam *Reconciling Burma/Myanmar: Essays on U.S. Relations with Burma*, (Seattle: Maret 2004): 20.
- Chetty, Lakshmana A., "India-Myanmar Partnership: Need for Widening and Deepening" dalam *India and ASEAN Foreign Policy Dimensions for the 21<sup>st</sup> Century*, (New Delhi: New Century Publications, 2005): 175-177.
- Deutsch, Morton, "Cooperation and Competition", dalam M. Deutsch, P. T. Coleman, & E. C. Marcus (Ed.), *The Handbook of Conflict Resolution: Theory and Practice* (23-42), (San Francisco: Jossey-Bass, 2009): 23-28.
- Earth Rights International, *China in Burma: The Increasing Investment of Chinese Multinational Corporations in Burma's Hydropower, Oil and Natural Gas, and Mining Sectors*, (Chiang Mai: ERI Publications, 2008): 3-9.
- Egreteau, Renaud, *A Passage to Burma? India, Development, and Democratization in Myanmar*, (Desember 2011): 467-483.
- Egreteau, Renaud, *India's Ambitions in Burma: More Frustration Than Success?*, (Desember 2008): 937-956.
- Gardner, Andy, Ashleigh S Griffin, dan Stuart A West, "Theory of Cooperation", dalam *Encyclopedia of Life Sciences*, (Chichester: Desember 2009): 1.
- International Crisis Group, *China's Myanmar Strategy: Elections, Ethnic Politics, and Economics*, (September 2010): 8-9, 16.
- International Energy Agency, *Understanding Energy Challenges in India*, (Paris, 2012): 24-28, 58, 62, 93.
- Kumar, Devindar, *Securing India's Energy Future*, (Australian Defence College, 2011): 1-15.

- Ministry of Development of North Eastern Region, *Expansion of North East India's Trade and Investment with Bangladesh and Myanmar*, (Oktober 2011): 4, 12-24, 50-63, 77.
- Mohan, C. Raja, *India's Geopolitics and Southeast Asian Security*, (2008): 45-57.
- Nayak, Purusottam, *Human Development Reports on North-East India: A Bird's Eye View*, (Shillong, 30 Agustus 2009): 4-9.
- Panwar, Namrata, *India and China Competing Over Myanmar Energi Resources*, (Leicester, 2009): 1-7, 10-12.
- Price, Gareth, *India's Policy Towards Burma*, (London: Chatham House, 2013): 3-6, 9.
- Research and Information System, *India-Myanmar Economic Relations*, (12 April 2012): 1-3.
- Saikia, Pradip, *North-East India as a Factor in India's Diplomatic Engagement with Myanmar: Issues and Challenges*, (5 November 2009): 877-887.
- Singh, N. Bhupendro, "Globalization and North East India: Challenges and Opportunities" dalam *Globalization and Industrial Relocation: Implications for the Development Strategy of the Underdeveloped Regions with special Reference to North East India* (Seminar di National Institute of Technology, Silchar, pada 27-28 Oktober 2006).
- Smith, Herbert, *Myanmar: Oil and Gas Landscape*, (Singapore, 2012): 1.
- U.S. Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control, "An Overview of the Burmese Sanctions Regulations Title 31 Part 537 of the U.S. Code of Federal Regulations" dalam *What You Need to Know About U.S. Sanctions Against Burma (Myanmar)*, (Washington, D.C., 5 Desember 2008): 1-3.
- Walt, Stephen M., "Alliance Formation and the Balance of World Power", (Cambridge: MIT Press, 1985): 8-15, 36-37.

## **Internet**

- Fearon, James D., "Bargaining, Enforcement, and International Cooperation", *International Organizations* 52 (Musim Semi 1998): 269.  
[http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/bargaining\\_enforcement.pdf](http://www.columbia.edu/itc/sipa/S6800/courseworks/bargaining_enforcement.pdf) diakses pada 8 November 2013.
- Freedom House, "Freedom in the World 2011", [internet]  
<http://www.freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2011> diakses pada 15 Oktober 2012
- Institute of Developing Economies-Japan External Trade Organization (IDE-JETRO), *China's Policy Toward Myanmar: Challenges and Prospects*,  
[http://www.ide.go.jp/English/Research/Region/Asia/201209\\_kudo.html](http://www.ide.go.jp/English/Research/Region/Asia/201209_kudo.html) Diakses pada 3 Desember 2013

- Maitra, Ramtanu, "The Strategic Importance of Myanmar for the Region and Beyond", [internet] [http://fsss.in/agni-volume/The Strategic Importance of Myanmar forthe Region a nd Beyond.pdf](http://fsss.in/agni-volume/The%20Strategic%20Importance%20of%20Myanmar%20for%20the%20Region%20and%20Beyond.pdf), 6. Diakses pada 8 November 2013
- Mohan, N. Chandra, "Realism in India-Myanmar Relations" [internet] [http://www.financialexpress.com/old/fe\\_full\\_story.php?content\\_id=42065](http://www.financialexpress.com/old/fe_full_story.php?content_id=42065) diakses pada 15 Oktober 2012
- Roy, Bhaskar, "Myanmar General's Visit-India's Interest and Security Prime" [internet] [http://indianstrategicknowledgeonline.com/hc.php?fnam=papers40\\_paper3942.pdf&titl=Myanmar%20Generals%20Visit%20%96%20Indias%20Interests%20And%20Security%20Prime&tnam=Myanmar](http://indianstrategicknowledgeonline.com/hc.php?fnam=papers40_paper3942.pdf&titl=Myanmar%20Generals%20Visit%20%96%20Indias%20Interests%20And%20Security%20Prime&tnam=Myanmar), 1. Diakses pada 8 November 2013
- Singh, Manmohan, "PM's Valedictory Address at the Seminar on the Occasion of Golden Jubilee of National Defence College", Kantor Perdana Menteri, Biro Informasi Pers, Pemerintah India [internet] <http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=66514> diakses pada 21 Mei 2013
- Tamen, Anaïs, "The European Union Sanctions Related to Human Rights: The Case of Burma/Myanmar" [internet] <http://www.ibiblio.org/obl/docs/Memoire-AT.htm#Toc54419311> diakses pada 3 November 2013.